BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara sebagai aktor dalam hubungan internasional merupakan kumpulan dari masyarakat yang dijadikan sebagai alat yang dituntut untuk mampu mengendalikan persoalan bersama seperti keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan. Peran negara yang dituntut untuk mampu memenuhi nilai sosial pada akhirnya membuat negara memerlukan interaksi dengan negara lainnya karena setiap negara berdaulat memiliki sebuah kepentingan nasional yang mengharuskan mereka untuk terlibat dalam interaksi sosial yang dapat menghasilkan manfaat, baik bagi negaranya sendiri ataupun bagi negara lainnya. Tidak semua tujuan negara dapat dicapai di dalam negeri. Karena itu suatu negara harus menjalin hubungan dengan negara lain atau aktor-aktor lain di dalam sistem internasional (Jemadu, 2014 : 48).

Hal ini kemudian membentuk sebuah pola dimana setiap negara berdaulat yang memiliki kepentingan nasional merumuskan kepentingan nasionalnya dalam sebuah kebijakan politik luar negeri. Setiap negara berdaulat memiliki kebijakan politik luar negeri tersendiri dan kebijakan luar negeri setiap negara tentunya berbeda, umumnya kebijakan luar negeri suatu negara akan didasari pada kepentingan nasionalnya, perbedaan kepentingan nasional dari setiap negara tentunya akan melahirkan kebijakan luar negeri yang berbeda pula, termasuk Indonesia yang memiliki kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Kebijakan

yang dibuat oleh Muhammad Hatta ini menggambarkan posisi Indonesia dalam melakukan interaski diranah internasional. Kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia yang memiliki arti bahwa posisi Indonesia yang bebas melakukan hubungan dan tidak membatasi sebuah hubungan hanya dengan satu negara ataupun pada satu faham. Sikap ini ditunjukan oleh Indonesia pada masa perang dingin, Indonesia secara tegas tidak memihak blok barat ataupun blok timur dan mencoba membentuk sebuah gerakan non – blok dimana dalam gerakan ini berisikan negara-negara dunia ke tiga yang tidak memihak terhadap blok barat yang diprakasai oleh Amerika Serikat maupun blok timur yang ditopang oleh kekuatan besar Uni Soviet dan aktif yang menggambarkan sikap aktif Indonesia yang berupaya untuk ikut berperan dalam menghapuskan penjajahan dan berperan dalam menciptkan perdamain dunia.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia didasarkan pada UUD Republik Indonesia tahun 1945 alenia pertama dan alenia ke-empat. Dimana pada alenia pertama Indonesia dengan tegas menyatakan :

> *“* Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas di dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan”. Dan alenia ke empat “.. dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial*”*.

Hal tersebut menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki perhatian khusus terhadap isu perdamaian. Secara konsisten Indonesia melakukan berbagai upaya dan usaha untuk ikut aktif berperan dalam menciptakan perubahan dan perkembangan di dunia internasional yang

mengarah kepada terwujudnya dunia yang lebih damai, lebih adil dan lebih sejahtera.

Kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia dapat dilihat ketika Indonesia menjadi salah satu negara pelopor konferensi Asia – Afrika yang diadakan pada tahun 1955. Konferensi yang ditujukan untuk membangun kerjasama negara-negara di kawasan Asia-Afrika dan untuk menumbuhkan semangat dan menambah kekuatan moral para pejuang bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang pada masa itu tengah memperjuangkan kemerdekaan tanah air mereka, sehingga kemudian lahirlah sejumlah negara merdeka di kawasan Asia dan Afrika. Dari konferesi tersebut juga melahirkan pernyataan politik atas prinsip-prinsip dasar dalam upaya memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Prinsip yang dikenal dengan Dasasila Bandung berikan menganai 10 prinsip dasar yang dijadikan acuan oleh negara-negara Asia dan Afrika, prinsip tersebut antara lain ;

1. Menghormati hak-hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dalam piagam PBB.
2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara.
3. Mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara besar dan kecil.
4. Tidak campur tangan di dalam urusan dalam negeri negara lain.
5. Menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif, sesuai dengan piagam PBB.

6. (a) Tidak menggunakan pengaturan-pengaturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar manapun.
   (b) Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain manapun.
7. Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi/ menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun.
8. Menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara damai, seperti melalui perundingan, konsiliasi, abritasi, atau penyelesaian hukum, ataupun cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai piagam PBB.
9. Meningkatkan kepentingan dan kerja sama bersama.
10. Menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban-kewajiban internasional (http://asianafricanmuseum.org/sejarah-konferensi-asia-afrika/ diakses pada diakses pada 5 Maret 2016).

Berdasarkan KAA dan Dasasila Bandung, Indonesia juga menjadi pelopor gerakan non-blok yang dilaksanakan di Yugoslavia pada tahun 1961. Upaya Indonesia dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri bebas aktifnya tidak hanya berhenti di KAA dan KTT non-Blok. Bukti lain bahwa Indonesia aktif dalam menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan pada UUD 1945 adalah dengan aktifnya Indonesia dalam menyuarakan berdirinya sebuah negara Palestina yang merdeka dan menjadikan Israel serta Palestina hidup damai berdampingan dengan negara tetangga lainnya sesuai dengan prinsip *twostate solution*, sesuai

dengan semangat yang terkandung dalam Resolusi DK-PBB No. 242 (1967) yang menyatakan :

1. Menegaskan bahwa pemenuhan prinsip-prinsip Piagam diperlukan untuk pembentukan perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah yang harus mencakup penerapan prinsip berikut :
    a. Penarikan pasukan Israel bersenjata dari wilayah yang diduduki dalam konflik baru-baru ini;
    b. Pemutusan dari semua klaim atau keadaan konflik dan penghormatan dan pengakuan dari kedaulatan, Teritorial yang terintergrasi dan kemerdekaan politik setiap negara di daerah dan hak mereka untuk hidup dalam damai dalam batas-batas yang aman dan diakui gratis dari ancaman atau tindakan kekerasan;
2. Menegaskan perlunya :
    a. Jaminan untuk kebebasan navigasi melalui jalur air internasional di daerah;
    b. Untuk mencapai hanya penyelesaian masalah pengungsi;
    c. Untuk menjamin tidak dapat diganggu gugat teritorial dan kemerdekaan politik setiap negara di daerah, melalui measu res termasuk pembentukan zona demiliterisasi;
3. Meminta Sekretaris Jenderal untuk menunjuk Wakil Khusus untuk melanjutkan ke Timur Tengah untuk membangun dan memelihara kontak dengan negara yang bersangkutan dalam rangka untuk mempromosikan kesepakatan dan membantu upaya-upaya untuk mencapai penyelesaian

damai dan diterima sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip di resolusi ini;

4. Meminta Sekretaris Jenderal untuk melaporkan kepada Dewan Keamanan progress dari Perwakilan Khusus sesegera mungkin (http://www.un.org /Depts/dpi/palestine/ch3.pdf diakses pada 5 Maret 2016).

Sikap Indonesia dalam memberikan dukungan dan bantuan bagi rakyat Palestina bukan tanpa alasan, sejak tahun 1940-an konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel selalu menjadi pusat perhatian masyarakat internasional. Konflik antara Palestina Israel dapat dikatakan sebagai konflik yang tak berujung, dilatar belakangi oleh masuknya orang Yahudi ke kawasan Palestina yang kemudian mendirikan negara Israel pada 14 Mei 1948 membuat gejolak konflik antara kedua negara tersebut semakin memanas. Konflik yang tidak berimbang ini membuat Palestina menjadi negara yang harus menerima kerugian dan dampak yang cukup besar.

Akibat konflik terjadi tersebut membuat Palestina harus mengalami penciutan luas wilayah yang sangat signifikan dan memaksa wilayah Palestina terbagi dalam dua wilayah yakni wilayah Jalur Gaza yang memiliki luas 360km² dan wilayah Tepi Barat yang memiliki luas wilayah 5860km². Selain terpisah menjadi dua wilayah, Israel juga melakukan kontrol terahadap sekitar 60% dari wilayah Tepi Barat, hal ini menyebabkan dua pertiga atau 40 % dari wilayah Tepi Barat tidak dapat di akses oleh warga Palestina karena terkait dengan infrastruktur dan pemukiman. Kondisi ini membuat adanya pembatasan akses barang, termasuk makanan dan obat-obatan terutama di daerah Gaza yang merupakan

daerah yang sering mendapatkan serangan dari Israel. Blokade di Jalur Gaza mengakibatkan sebanyak 14.920 rakyat Palestina di Jalur Gaza menjadi tunawisma, termasuk 12.000 orang di antara mereka yang pindah ke gedung-gedung milik PBB atau sekolah-sekolah pemerintah Blokade yang dilakukan semakin membuat perekonomian dan pemerintahan Palestina lumpuh. Agresi Israel memukul drastis perekonomian di Gaza sekitar 80% warga Palestina di Gaza memerlukan bantuan dan kondisi mereka semakin buruk akibat kepungan Israel. Berdasarkan perhitungan terbaru, sekitar 35% lahan pertanian di Gaza dan 85% wilayah perairannya tidak dapat diakses oleh warga Palestina (dia kses melalui http://sahabatalaqsha.com/nws/?p=9238 pada 5 Maret 2016).

Sedangkan di Tepi Barat, Israel melakukan blokade yang membuat warga Palestina sulit untuk mengakses wilayah Tepi Barat. Blokade yang dilakukan Israel berupa blokade fisik dimana Israel membuat dinding yang tidak dapat dilewati warga Palestina. Wilayah Tepi Barat merupakan daerah kunci dari Palestina dimana Tepi Barat merupakan jantung politik dan ekonomi Palestina. Blokade-blokade yang dibuat oleh tentara Israel membuat wilayah-wilayah Palestina terpecah menjadi daerah-daerah yang terisolasi. Laporan ILO menyatakan bahwa tingkat pengangguran dikalangan laki-laki muda adalah 80% dan perempuan 63%. Selain hal tersebut warga Palestina juga bergantung pada bantuan kemanusian yang diberikan oleh negara lain (diakses melalui https: //www.islampos.com/dampaknegatifnkonflikpalestinamunculkan-banyak-pengangguran-186461/ pada 5 Maret 2016).

Untuk dapat mengupayakan berdirinya negara Palestina Indonesia telah melakukan berbagai upaya, baik upaya yang dilakukan secara bilateral maupun upaya-upaya yang ditempuh dengan cara membawa isu Palestina dalam forum-forum internasional. Upaya bilateral yang dilakukan Indonesia dalam dukungannya terhadap Palestina adalah dengan cara memberikan pengakuan resmi bagi Palestina pada 15 Desember 1988 dan juga Indonesia secara aktif memberikan bantuan terhadap Palestina. Sedangkan melalui forum-forum internasional ditempuh Indonesia dengan membawa isu-isu Palestina ke dalam forum perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Organisasi Kerjasama Islam atupun dalam petermuan-pertemuan rutin yang diadakan oleh Indonesia dan negara-negara Asia dan Afrika dalam Konferensi Asia Afrika.

Langkah multilateral lain yang diambil oleh Indoensia berkenaan dengan isu Palestina adalah menjadikan Palestina sebagai sebuah isu bersama dan menjadikan Palestina sebagai perhatian khusus dalam *New Asia Africa Strategic Partneship*. NAASP merupakan forum yang dibentuk bertepatan dengan peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika pada tahun 2005. Selain sebagai sebuah gerakan yang diharapkan kembali menyulut semangat KAA, *The New Asia Africa Strategic Partnership* dijadikan Indonesia sebagai sebuah pijakan untuk mengajak negara-negara Asia Afrika memberikan perhatian khusus terhadap Palestina dan menjadikan Palestina sebagai isu utama sebagai bentuk implementasi pilar solidaritas politik NASSP dan menjadikan Palestina sebagai tanggung jawab negara-negara Asia dan Afrika.

NAASP yang merupakan bagian dari KAA membuat kepentingan Indonesia untuk dapat menjadikan Palestina sebagai sebuah negara merdeka dapat direalisasikan dengan sebuah program pelatihan penigkatan kapasitas sumber daya manusia yang ditujukan untuk negara Palestina, program yang bernama *Capacity Building For Palestine* merupakan hasil dari pertemuan *NAASP Ministerial Conference* on *Capacity Building for Palestine* yang dilaksanakan pada tahun 2007 dianggap mampu memenuhi keinginan Indonesia untuk membantu Palestina. Konferensi tersebut dihadiri oleh 56 negara, dimana 53 diantaranya merupakan ngeara-negara dikawasan Asia dan Afrika serta 3 negara lainnya dari negara Amerika Latin seperti Brazil, Venezuela, dan Cili. Dari pertemuan tersebut disepakati komitmen dari masing-masing negara untuk memberikan peningkatan kapasitas bagi Palestina melalui NAASP *capacity building for Palestine.*

Program *capacity building* ini dinilai sangat berguna bagi kelangsungan warga Palestina untuk menjalankan sebuah bangsa. Bantuan teknis berupa *capacity building* tersebut merupakan sebuah upaya membangun sumberdaya manusia yang profesional sehingga begitu kemerdekaan sudah diraih oleh bangsa Palestina, penyelenggaraan negara dan sektor-sektor publik dapat berjalan dengan baik. Dengan kata lain kebijakan *Capacity Building for Palestine* ini ditujukan sebagai sebuah strategi untuk mempersiapkan kehidupan warga Palestina pasca kemerdekaan dan bukan sebuah strategi yang dibentuk untuk mencapai kemerdekaan. Program *capacity building* merupakan bantuan teknis yang

diberikan kepada masyarakat Palestina dan pejabat pemerintah. Melalui program tersebut warga Palestina akan mendapatkan pelatihan ditiga sektor yaitu pemerintahan, infrastruktur dan pembangunan sosial budaya (http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/103-juli-2010/852-program-capacity-building-untuk-palestina.html).

Selain untuk mendukung penyelenggaraan negara dan sektor-sektor publik untuk berjalan dengan baik pasca kemerdekaan, melalui pelatihan tersebut juga diharapkan dapat mendorong warga Palestina untuk mampu menciptakan efesiensi dan efektivitas pemerintahan, menciptakan pemerintahan yang terbuka dan *accountable* bagi warga Palestina, meningkatkan hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyrakat, menciptakan pelayanan pendidikan yang berkualitas, mampu menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas, mampu memeperbaiki kerusakan insfratuktur yang telah hancur akibat konflik, dan mampu membentuk perekonomian yang baik sehingga dapat menopang kehidupan warga Palestina.

Indonesia selaku negara penggagas menunjukan komitmennya dengan melakukan 24 program pelatihan bagi warga dan pemerintah Palestina. Program yang dilakukan sejak tahun 2008 hingga 2013. Sebanyak 1000 orang warga Palestina yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas oleh Indonesia. Program yang dilkakukan Indonesia sendiri antara lain meliputi pelatihan dibidang ekonomi, kesehatan, pemerdayaan pemuda dan perempuan, pendidikan serta tekonlogi dan informasi (http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/103-juli-2010/852-program-capacity-building-untuk-palestina.html. diakses pada 7 Mei 2016).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa rujukan dari skripsi dan jurnal sebelumnya yang membahas peranan Indonesia dan posisi Indonesia dalam *New Asia Africa Strategi Partnership*, diantaranya sebagai berikut;

1. Skripsi dengan judul Politik Luar Negeri Republik Indonesia Melalui KTT Asia Afrika 2005 yang ditulis oleh F.X Wawolangi pada tahun 2010. Perbedaan dalam skripsi ini adalah dalam skripsi yang diangkat oleh F.X Wawolangi lebih mengangkat kepentingan nasional Indonesia untuk dapat ikut serta menciptakan keamanan dunia melalui sebuah wadah yang bernama *New Asia Africa Strategi Partnership* sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti lebih fokus terhadap kepentingan Indonesia dalam gagasannya memberikan pelatihan peningkatan kapasitas warga Palestina.
2. Skripsi dengan judul Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Konflik Palestina Pasca Agresi Isarael (2008) yang ditulis oleh Muhammad Imam Noviar pada tahun 2015. Perbedaan skripsi ini adalah, dalam skripsi yang diangkat oleh Muhammad Imam Noviar lebih mengangkat terhadap respon yang diberikan Indonesia pasca agresi Israel tahun 2008 melalui Dewan Keamanan PBB dan Gerakan Non-Blok. Persamaan skripsi tersebut adalah mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia terhadapkonflik Palestina.
3. Jurnal dengan judul *Quo vadis NAASP* untuk Palestina? Urgensi Program *Capacity Building* dan Revitalisasi Diplomasi Indonesia yang ditulis oleh Mohamad Rosyidin. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai peran Indonesia dalam membentuk *New Asia Africa Strategi Partnership* yang

kemudian berlanjut terhadap lahirnya progam *Capacity Building for Palestine*. Perbedaan antara jurnal tersebut dengan judul skripsi yang diambil oleh peneliri adalah Jurnal ini hanya membahas bagaimana peran Indonesia sehingga dapat membawa kepentingan nasionalnya dan membuat agenda *Capacity Building for Palestine* di *New Asia Africa Strategi Partnership,* sedangkan peneliti melakukan penelitian terhadap kepentingan Indonesia dalam program penigkatan kapsitas tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengadakan penelitian dengan judul : "**Kepentingan Nasional Indonesia *Dalam Capacity Building For Palestine* (2008- 2013)**"

Adapun ketertarikan penulis untuk meneliti dan mengangkat isu tersebut didukung oleh beberapa mata kuliah disiplin Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya adalah:

1. Politik Luar Negeri Indonesia

   Melalui mata kuliah ini diharapkan dapat membantu peneiliti dalam mengamati sebuah kebijakan yang dibuat oleh sebuah negara baik yang dapat merugikan negara lain ataupun menguntungkan bagi negara lain. Dalam penelitian ini politik luar negeri Indonesia dapat dikatakan sebagai kunci dari lahirnya kerjasama-kerjsama ataupun hubungan Indonesia dengan negara lainnya terlebih dalam memberikan bantuan terhadap Palestina. Selain itu melalui mata kuliah ini diharpakan membantu peneliti dalam mengamati landasan-landasan yang menjadi tolak ukur Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya.

2. Hubungan Internasional di Timur-Tengah

   Melalui mata kuliah ini peneliti diharapkan dapat melakukan analisa mengenai kegiatan interkasi internasional yang terjadi di Timur Tengah khususnya hubungan internasional yang terjadi antara Indonesia dengan Palestina. Melalui mata kuliah ini juga diharapkan mamapu membantu peneliti untuk mengetahui kondisi negara-negara dikawasan Timur Tengah khususnya di negara Palestina yang merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang dalam penelitian ini sebagai negara yang melalukan hubungan dengan Indonesia.

3. Analisa Politik Luar Negeri

   Melalui mata kuliah ini peneliti dapat mengetahui dan menganalasi yang melandasi sebuah negara menentukan politik luar negerinya sehingga dapat menjadi sebuah kebijakan luar negeri. Salah satunya digunakan oleh peneliti untuk menganalisa arah kebijakan politik luar negeri Indonesia khususnya dalam memberikan bantuan bagi Palestina.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Major

“ Bagaimana kepentingan nasional Indonesia dalam *Capacity Building For Palestine ?”*

1.2.2 Rumusan Minor

1. Bagaimana tujuan yang diharapkan Indonesia dalam *Capacity Building for Palestine*?

2. Bagaimana posisi program *Capacity Building for Palestine* dalam kepentingan nasional Indonesia ?
3. Bagaimana hasil yang didapat Indonesia dalam *Capacity Building for Palestine* yang dilakukan oleh Indonesia ?

1.2.3 Pembatasan Masalah

New Asia Africa Strategic Partneship Capacity Building For Palestine merupakan program yang berjalan dari tahun 2008 – 2013 dan merupakan sebuah dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina melalui pengembangan kapasitas bagi warga Palestina. Sebagai bentuk komitmen dalam program tersebut terdapat 24 program yang telah dilakukan oleh Indonesia meliputi bidang pendidikan, sosial-budaya, ekonomi, pemberdayaan perempuan, insfratuktur, pajak dll. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pembatasan masalah dengan menjadikan program-program yang diberikan oleh Indonesia sebagai pemabatas masalah. Hal tersebut digunakan karena dirasa mampu untuk membantu peneliti mengetahui kepentingan nasional Indonesia dalam *New Asia Africa Strategic Partneship Capacity Building For Palestine.*

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan uraian dan rumusan masalah diatas penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sikap Indonesia yang secara konsisten memeberikan dukungannya terhadap Palestina yang dilakukan melalui berbagai upaya dan tindakan salah satunya adalah melalui *New Asia Africa Strategic Partnership*

Capacity Building for Palestine Melalui penelitian ini peneliti juga bermaksud untuk mengtahui maksud serta tujuan yang dilakukan oleh Indonesia dalam setiap program pelatihan yang diberikan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui upaya Indonesia menjaga perdamain dunia.
2. Untuk mengetahui cara Indonesia menjaga konsistensinya dalam pemberian dukungan terhadap Palestina.
3. Untuk mengetahui maksud dan tujuan Indonesia dalam program *New Asia Africa Strategic Partnership Capacity Building for Palestine*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan melalui peneltian dapat menambah wawasan peneliti serta memberikan atau menambah pembendaharaan pustaka, serta dapat memberikan sedikit sumbangan bagi ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional mengenai kepentingan nasional Indonesia dalam *Capacity Building for Palestine.*

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan melalui penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
2. Sebagai bahan referensi bagi penstudi Hubungan Internasional.